



Analisis Badai Inflasi Hipotetis: Dampak dan Respons Kebijakan pada Awal Pemerintahan Prabowo Subianto di Indonesia Tahun 2025

Zulkadri^{1*}, Anggun Citra L², Rahmawati³, Oktavia Amanda Putri⁴

^{1,2,3,4}STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

Email : zulkadri94@gmail.com^{1*}, samudrajordan@gmail.com²,
rahmawati5015195@gmail.com³, putrioktaviaamandaputrisurya@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis skenario hipotetis lonjakan inflasi hingga 17% pada awal pemerintahan Prabowo Subianto di Indonesia tahun 2025, menyoroti tantangan ekonomi signifikan pasca stabilitas inflasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi penyebab potensial seperti depresiasi Rupiah, kebijakan fiskal ekspansif, disrupsi rantai pasokan, gejala harga komoditas global, dan erosi kepercayaan pasar, serta menganalisis dampaknya terhadap daya beli, biaya pinjaman, stabilitas sosial-politik, dan daya saing internasional. Pendekatan deskriptif-analitis dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif berbasis data sekunder digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi faktor-faktor ini akan membawa dampak ekonomi dan sosial yang merugikan, mendorong perlunya respons kebijakan yang kuat. Berbagai respons kebijakan seperti pengetatan moneter, konsolidasi fiskal, intervensi valuta asing, kebijakan sisi penawaran, dan strategi komunikasi dieksplorasi. Penelitian ini menyajikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data dan wawasan ahli untuk menavigasi tekanan inflasi, demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia.

Kata kunci: Inflasi, Kebijakan Ekonomi, Dampak Ekonomi, Respons Kebijakan

Abstract

This research analyzes a hypothetical scenario of an inflation surge to 17% at the onset of Prabowo Subianto's administration in Indonesia in 2025, highlighting a significant economic challenge following a period of inflation stability. The study aims to identify potential causes such as Rupiah depreciation, expansive fiscal policies, supply chain disruptions, global commodity price volatility, and erosion of market confidence, as well as to analyze its impacts on purchasing power, borrowing costs, socio-political stability, and international competitiveness. A descriptive-analytical approach combining qualitative and quantitative methods based on secondary data was employed. The results indicate that a combination of these factors would lead to detrimental economic and social consequences, necessitating robust policy responses. Various policy responses are explored, including monetary tightening, fiscal consolidation, foreign exchange interventions, supply-side policies, and communication strategies. This research presents strategic recommendations based on data analysis and expert insights to navigate inflationary pressures, for the sake of Indonesia's sustainable economic stability and growth.

Keywords: Inflation, Economic Policy, Economic Impact, Policy Response

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai indikator ekonomi, tingkat inflasi yang terkendali memegang peranan krusial. Inflasi yang rendah dan stabil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, konsumsi, dan perencanaan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menimbulkan ketidakpastian, menggerus daya beli masyarakat, mendistorsi harga-harga relatif, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. (Rohmah et al., 2024, p. 2) Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga merupakan tujuan fundamental kebijakan makroekonomi di berbagai negara.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan dinamika ekonomi yang kompleks, telah mengalami berbagai episode inflasi tinggi di masa lalu. Salah satu contoh yang paling parah adalah krisis moneter tahun 1998, yang menyebabkan inflasi meroket hingga lebih dari 70%. Inflasi pada masa itu dipicu oleh kombinasi faktor-faktor seperti depresiasi nilai tukar Rupiah yang tajam, krisis perbankan, dan ketidakstabilan politik. Pengalaman ini memberikan pelajaran yang berharga tentang betapa rentannya perekonomian Indonesia terhadap guncangan ekonomi yang besar. Krisis 1998 mengajarkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat memicu krisis multidimensi, menghancurkan kepercayaan pasar, dan menyebabkan kontraksi ekonomi yang parah.

Sebelum pelantikan Prabowo Subianto pada Oktober 2024, Indonesia menikmati periode inflasi yang relatif rendah dan stabil. Data terkini menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57%, bahkan mencapai titik terendah dalam 25 tahun terakhir dengan 0,76% pada Januari 2025. (Pada Desember 2024 Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Adalah Sebesar 1,57 Persen, 2025) Penurunan inflasi ini juga dikonfirmasi oleh sumber lain yang mencatat inflasi sebesar 1,6% pada akhir tahun 2024, dengan rata-rata 2,3% sepanjang tahun tersebut. Kontras yang mencolok antara tingkat inflasi yang sangat rendah ini dengan skenario hipotetis 17% menunjukkan bahwa lonjakan harga sebesar itu kemungkinan akan disebabkan oleh kejutan ekonomi yang sangat tiba-tiba dan kuat, atau kombinasi dari beberapa faktor parah yang terjadi secara bersamaan. Lonjakan inflasi yang cepat dan substansial seperti ini akan menimbulkan tantangan yang sangat besar bagi stabilitas ekonomi makro Indonesia dan dapat memicu konsekuensi yang luas. (Sriyana, 2022)

Di sisi lain, lanskap ekonomi global pada awal tahun 2025 diwarnai oleh ketegangan perdagangan yang berkelanjutan antara negara-negara besar, perang dagang yang berkepanjangan dapat memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakpastian yang timbul dari perang dagang dapat mengganggu arus perdagangan internasional, memicu volatilitas harga komoditas, dan melemahkan sentimen investor. (Hanifah et al., 2020, p. 24) Secara khusus, kenaikan tarif impor yang signifikan oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia, seperti yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump dengan kenaikan pajak sebesar 32%, semakin memperburuk situasi ini. Langkah proteksionis ini tidak hanya berpotensi mengurangi volume ekspor Indonesia tetapi juga dapat memicu pembalasan perdagangan dari negara-negara lain, yang semakin memperburuk prospek perdagangan global. Eskalasi perang dagang seperti ini dapat menciptakan lingkaran setan proteksionisme, mengurangi efisiensi ekonomi global, dan menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar, terdapat beberapa kesamaan antara potensi dampak perang dagang dengan kenaikan tarif yang tinggi dan krisis moneter 1998. Kedua situasi tersebut melibatkan guncangan eksternal yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 1998, guncangan tersebut berupa krisis finansial regional, sementara pada tahun 2025, guncangan

tersebut berupa eskalasi perang dagang dan kebijakan proteksionis AS. Kedua situasi ini dapat memicu depresiasi nilai tukar Rupiah, meningkatkan biaya impor, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Namun, penting untuk dicatat bahwa krisis 1998 memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk krisis perbankan domestik dan ketidakstabilan politik yang parah, yang tidak secara langsung terkait dengan perang dagang. Perbedaan utama lainnya adalah bahwa perang dagang lebih berdampak langsung pada sektor perdagangan dan industri, sementara krisis 1998 memiliki dampak yang lebih luas pada sektor keuangan.

Dalam konteks ini, timbul sebuah gap penelitian terkait bagaimana kombinasi faktor domestik dan eksternal, khususnya eskalasi perang dagang, dapat memicu lonjakan inflasi ekstrem di Indonesia, dan bagaimana mekanisme dampaknya berbeda atau serupa dengan krisis inflasi masa lalu. Studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Al Bina, Rahmadana, dan Yusuf (2023) serta Endri (2009), telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, termasuk nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, dan faktor eksternal seperti harga komoditas global. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas skenario lonjakan inflasi yang disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor domestik dan eksternal yang parah, termasuk eskalasi perang dagang dan kebijakan tarif proteksionis AS, pada awal pemerintahan baru. Oleh karena itu, masih terdapat kebutuhan untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel ini dapat berinteraksi dalam skenario krisis yang unik, yang ditandai oleh ketegangan perdagangan global dan perubahan kebijakan ekonomi domestik yang signifikan. (Adrian & Rofiuddin, 2023)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada satu skenario hipotetis yang dapat menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia: lonjakan inflasi hingga mencapai 17% pada awal masa pemerintahan Prabowo Subianto di tahun 2025. Skenario ini, meskipun bersifat spekulatif, memiliki relevansi signifikan mengingat pentingnya menjaga ekspektasi inflasi dan kredibilitas kebijakan di awal masa transisi. Tingkat inflasi 17% jauh melampaui target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas makroekonomi, mengurangi efektivitas kebijakan moneter, dan meningkatkan risiko krisis keuangan. Lonjakan inflasi setinggi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. (Sunardi et al., 2024) Di antara faktor-faktor domestik, depresiasi nilai tukar Rupiah yang tajam dan tiba-tiba, kebijakan fiskal ekspansif yang tidak terkendali, dan gangguan pada rantai pasokan domestik dapat menjadi pendorong utama. Sementara itu, faktor-faktor eksternal seperti lonjakan harga komoditas global, ketidakpastian di pasar keuangan internasional, dan dampak eskalasi perang dagang global, termasuk kenaikan tarif impor oleh AS, juga dapat memberikan tekanan inflasi yang signifikan. (Purwowidhu, 2025)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Menganalisis potensi penyebab lonjakan inflasi hingga 17% pada awal pemerintahan Prabowo Subianto tahun 2025, dengan fokus pada kombinasi faktor-faktor domestik (depresiasi nilai tukar, kebijakan fiskal ekspansif) dan eksternal (perang dagang, kenaikan tarif impor AS). 2) Mengevaluasi bagaimana eskalasi perang dagang dan kebijakan tarif AS dapat memperburuk tekanan inflasi di Indonesia, serta membandingkan dampaknya dengan mekanisme penularan inflasi pada krisis 1998. 3) Memproyeksikan dan menganalisis dampak lonjakan inflasi yang tinggi terhadap variabel-variabel ekonomi utama (pertumbuhan PDB, konsumsi, investasi, neraca perdagangan) dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 4) Mengidentifikasi dan mengevaluasi opsi respons kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengatasi lonjakan inflasi, serta menganalisis efektivitasnya dalam menghadapi ketidakpastian

perdagangan global dan kebijakan proteksionis. 5) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi Indonesia dalam mengatasi potensi inflasi tinggi, berdasarkan pelajaran yang dipetik dari krisis 1998 dan pengalaman negara lain dalam menghadapi tantangan serupa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, dan masyarakat luas dalam memahami potensi risiko inflasi dan merumuskan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai dinamika inflasi dan kebijakan ekonomi di Indonesia, terutama dalam konteks interaksi antara faktor-faktor domestik dan global, termasuk dampak perang dagang dan kebijakan perdagangan proteksionis, serta perbandingan dengan episode inflasi tinggi di masa lalu seperti krisis 1998, dan analisis mengenai implikasi stabilitas politik dari tekanan inflasi dalam konteks global saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus Historis Komparatif dengan Analisis Campuran (Mixed-Methods Analysis) Berbasis Data Sekunder. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap pola inflasi di Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebab, dan mengevaluasi respons kebijakan, khususnya dalam konteks skenario hipotetis lonjakan inflasi 17% pada awal pemerintahan Prabowo Subianto di tahun 2025.

Desain penelitian ini mengintegrasikan komponen kualitatif dan kuantitatif. Komponen kualitatif berfokus pada analisis naratif dan interpretatif dari peristiwa inflasi tinggi historis, kebijakan pemerintah terkait, serta dampak sosial-ekonominya. Sementara itu, komponen kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data statistik mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan neraca perdagangan.

Data sekunder utama diperoleh dari lembaga resmi seperti Bank Indonesia (BI) untuk data inflasi (Indeks Harga Konsumen), suku bunga, nilai tukar, dan kebijakan moneter. Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor-impor, dan survei ekonomi. Informasi anggaran negara dan kebijakan fiskal bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, laporan dan data ekonomi makro dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia digunakan untuk konteks ekonomi global. Wawasan tambahan juga dikumpulkan dari literatur ilmiah (jurnal, buku, artikel berita, dan publikasi penelitian) yang relevan dengan sejarah inflasi Indonesia dan krisis ekonomi global.

Periode penelitian mencakup data historis yang relevan untuk analisis episode inflasi tinggi sebelumnya, dengan penekanan khusus pada krisis moneter 1998. Data terkini hingga awal tahun 2025 digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi pra-skenario. Data publik dari lembaga-lembaga tersebut menjadi batasan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data didominasi oleh studi pustaka dan dokumentasi, yaitu penelaahan cermat berbagai sumber tertulis dan pengunduhan data statistik dari situs web resmi serta laporan ekonomi.

Untuk analisis data, pendekatan multi-aspek diadopsi untuk mengintegrasikan temuan kualitatif dan kuantitatif: 1) Analisis Deskriptif Kuantitatif, Menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, persentase, dan tren untuk menggambarkan data inflasi dan variabel ekonomi makro terkait. Analisis ini mencakup perbandingan data inflasi dari periode historis penting, khususnya krisis moneter 1998, dengan skenario inflasi 17% yang diasumsikan untuk tahun 2025. Skenario hipotetis 17% ini disusun berdasarkan proyeksi dampak gabungan dari faktor-faktor pendorong inflasi domestik (misalnya, depresiasi nilai tukar Rupiah signifikan, kebijakan fiskal ekspansif tak terkendali) dan guncangan eksternal (seperti eskalasi perang dagang global dan kenaikan tarif impor AS yang

substansial), yang diperkirakan akan menciptakan tekanan harga ekstrem. 2) Analisis Komparatif Historis Kualitatif, Dilakukan untuk membandingkan peristiwa inflasi tinggi masa lalu (khususnya krisis 1998) dengan skenario hipotetis inflasi 17% pada tahun 2025. Analisis ini berfokus pada identifikasi faktor pemicu, dampak, dan respons kebijakan yang diterapkan selama setiap periode. Tujuannya adalah mengekstrak pelajaran berharga dari upaya manajemen inflasi yang berhasil maupun yang tidak.

Melalui integrasi analisis kuantitatif dan kualitatif ini, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola umum dan memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan untuk mengatasi potensi skenario inflasi tinggi 17% di Indonesia pada tahun 2025, yang pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan dapat ditindaklanjuti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Internal Pemicu Inflasi

1. Depresiasi Nilai Tukar Rupiah

Depresiasi nilai tukar Rupiah merupakan kanal utama transmisi inflasi, sejalan dengan teori imported inflation dan pass-through. Fenomena ini terjadi ketika biaya barang dan jasa yang diimpor meningkat secara proporsional dengan pelemahan mata uang domestik, yang pada akhirnya diteruskan ke harga konsumen.(Boediono, 2020)

Data historis krisis 1998 secara empiris mengkonfirmasi kekuatan pass-through effect. Dengan pelemahan Rupiah yang drastis, harga barang-barang impor melonjak tinggi. Misalnya, ilustrasi barang impor \$100 yang harganya naik dari Rp250.000 menjadi Rp1.500.000 mencerminkan kenaikan biaya impor yang ekstrem, memicu imported inflation yang parah pada barang konsumsi dan barang dengan komponen impor tinggi. Dampaknya adalah penurunan daya beli masyarakat secara seketika, yang juga disorot oleh Sunardi et al. (2024) dalam analisis mereka tentang krisis moneter 1997-1998.(Idris, 2024)

Selain itu, ketergantungan banyak industri di Indonesia pada bahan baku, komponen, atau barang modal impor menjadikan pelemahan Rupiah sebagai pemicu inflasi biaya produksi (cost-push inflation). Kenaikan biaya input ini terpaksa diteruskan ke harga jual produk akhir, merugikan baik produsen maupun konsumen.(Yulianti, 2025)

Meskipun tidak seekstrem 1998, pelemahan Rupiah saat ini tetap menunjukkan pola dampak serupa, namun dengan skala yang lebih terkendali berkat kerangka kebijakan moneter dan fiskal yang lebih robust. Pelemahan Rupiah seringkali dipicu oleh faktor eksternal, seperti kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang mendorong capital outflow (penarikan modal asing) dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini mengakibatkan penguatan Dolar AS dan pelemahan Rupiah. Analisis ini konsisten dengan temuan Al Bina, Rahmadana, dan Yusuf (2023) yang mengidentifikasi nilai tukar Rupiah sebagai faktor signifikan yang memengaruhi inflasi jangka pendek di Indonesia, serta Endri (2009) yang menekankan peranan nilai tukar.(Ramadan, 2025)

Dalam skenario 2025, jika pelemahan Rupiah terjadi, kenaikan harga komoditas global (misalnya minyak, pangan) yang harus diimpor akan semakin mahal dalam Rupiah. Ini akan berdampak langsung pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan kebutuhan pokok seperti gandum. Industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi, memaksa mereka menaikkan harga jual produk atau mengurangi margin keuntungan. Pemerintah mungkin mencoba menahan kenaikan harga melalui subsidi, namun ini akan membebani anggaran negara dan bisa memicu defisit fiskal jika tidak diatur cermat, sesuai dengan trade-off antara stabilitas harga dan keberlanjutan fiskal .

2. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), telah dicapai beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Nilai tukar Rupiah direvisi menjadi Rp16.000,00 per Dolar AS dari asumsi awal Rp16.100,00 per Dolar AS, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diturunkan menjadi 7,0 persen dari sebelumnya 7,1 persen. Selain itu, target lifting minyak dinaikkan menjadi 605 ribu barel per hari (bph), sedikit lebih tinggi dari target awal 600 ribu bph. Asumsi untuk Indonesian Crude Price (ICP) tetap pada US\$82 per barel, dan lifting gas juga tidak berubah di 1.050 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Dengan berlanjutnya upaya menjaga stabilitas ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2%. Angka ini dianggap realistis, mengingat dinamika pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang sedang berjalan, yang diharapkan mampu mendorong percepatan kinerja ekonomi. Namun, pemerintah juga tetap mewaspadai berbagai risiko ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian nasional ke depan. Khusus untuk inflasi, disepakati targetnya dapat ditekan hingga 2,5% pada tahun 2025.

Program-program ini, terutama yang bersifat langsung ke masyarakat seperti MBG, merupakan bentuk kebijakan fiskal ekspansif. Dalam konteks teori permintaan agregat Keynesian, peningkatan belanja pemerintah yang signifikan akan meningkatkan permintaan agregat. Jika peningkatan permintaan ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi atau pasokan yang memadai, maka akan timbul tekanan inflasi demand-pull. Sukarman (2018) dalam studinya tentang dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia menemukan korelasi positif antara belanja pemerintah dan inflasi, terutama jika belanja tersebut kurang produktif atau tidak mendorong peningkatan kapasitas produksi riil. Ini berarti, meskipun program MBG bertujuan mulia, implementasinya perlu diatur sedemikian rupa agar tidak menciptakan lonjakan permintaan yang tak terkendali. (Segara & Prakoso, 2025, p. 6)

Kerangka kebijakan fiskal untuk tahun 2026 yang dipaparkan, dengan fokus pada stabilisasi ekonomi, perlindungan dunia usaha, dan kredibilitas APBN, menunjukkan niat pemerintah untuk menjaga keseimbangan. (Menkeu Sampaikan KEM-PPKF 2026 Hari Ini, 2025) Namun, delapan area prioritas pembangunan, termasuk penguatan ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, pemberdayaan UMKM, dan penguatan pertahanan semesta, memerlukan alokasi anggaran yang besar. Khusus untuk penguatan pertahanan semesta, belanja militer yang substansial, tanpa diimbangi peningkatan produktivitas yang sepadan, dapat dianggap inflasioner karena menciptakan permintaan tanpa secara langsung menambah pasokan barang dan jasa sipil. (Supriyanto, 2025)

Strategi pendapatan negara yang difokuskan pada perluasan basis pajak dan penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta efisiensi belanja negara dan penyempurnaan subsidi, adalah langkah-langkah untuk menjaga kesehatan fiskal. Meskipun defisit direncanakan pada kisaran 2,48%–2,53% PDB, skenario inflasi 17% mengindikasikan bahwa terdapat risiko di mana defisit ini dapat melebar atau pembiayaan yang dilakukan kurang prudent, sehingga dapat memicu inflasi, terutama jika dibiayai melalui pencetakan uang atau utang yang tidak berkelanjutan, yang sejalan dengan teori kuantitas uang.

Kombinasi antara potensi depresiasi nilai tukar Rupiah (dipicu oleh faktor eksternal) dan risiko tekanan demand-pull dari kebijakan fiskal ekspansif yang tidak diimbangi kapasitas produksi memadai, dapat menjadi pemicu inflasi domestik yang signifikan. Pengalaman 1998 menegaskan bahwa depresiasi nilai tukar yang ekstrem adalah katalisator inflasi yang sangat kuat, dan meskipun

kondisi fundamental saat ini lebih baik, risiko tetap ada jika kedua faktor ini berinteraksi secara negatif.(Ariesta, 2025)

Faktor Eksternal Pemicu Inflasi
1. Eskalasi Perang Dagang Global

Tabel 1. Kebijakan Tarif Agresif AS (Skenario Pemerintahan Trump 2025)

Tanggal Perkiraan	Aksi AS	Balasan/Dampak Tiongkok (dan Lainnya)	Catatan
Awal Februari	AS menaikkan tarif 10% pada barang Tiongkok.	Tiongkok membalas dengan tarif 15% pada impor LNG dan batu bara AS.	Awal eskalasi cepat pasca Biden.
Awal Maret	kenaikkan tarif Tiongkok sebesar 10%.	Tiongkok menanggihkan impor kayu gelondongan AS dan tarif 15% pada produk pertanian AS	
Pertengahan Maret	tarif global 25% untuk impor baja dan aluminium.		Kebijakan tarif yang lebih luas,
Akhir Maret - Awal April	tarif 25% pada impor mobil rakitan tarif dasar 10% untuk hampir semua negara mitra dagang (efektif 5 April). AS mengumumkan tarif "resiprokal" tambahan spesifik per negara (efektif 9 April) berdasarkan IEEPA.	Total tarif efektif AS terhadap Tiongkok mencapai 54% atau lebih tinggi. Penghentian fasilitas <i>de minimis</i> dari Tiongkok diumumkan (efektif Mei 2025).	Penggunaan dasar hukum yang lebih luas untuk pengenaan tarif.
String Balasan Cepat (April)	AS menambah tarif 50% atas Tiongkok. AS menanggihkan tarif resiprokal spesifik negara (kecuali Tiongkok) selama 90 hari untuk negosiasi, namun menaikkan tarif Tiongkok hingga 125%.	Tiongkok membalas dengan tarif 34%. Kanada menerapkan tarif balasanTiongkok menaikkan tarif balasannya hingga menyamai AS, mencapai 125%.	Periode balasan tarif paling intens.
Pertengahan April	Laporan menyebutkan tarif AS atas barang Tiongkok mencapai 145%.	Pemerintah Tiongkok menyatakan kenaikan tarif AS lebih lanjut akan diabaikan karena level saat ini sudah membuat impor dari AS tidak mungkin bagi pasar Tiongkok.	Titik di mana Tiongkok menganggap impor AS tidak lagi viable.

Eskalasi perang dagang seperti yang disajikan dalam skenario ini akan memicu guncangan signifikan pada sistem perdagangan global, yang diperkirakan akan menyebabkan penurunan volume perdagangan barang global sekitar 0,2%. Ini akan menimbulkan dampak pada beberapa sektor spesifik:

1. Ekspor LNG AS ke Tiongkok anjlok drastis 70% pada kuartal pertama tahun 2025 dan bahkan terhenti total pada Maret.
2. Penjualan industri produk promosi mengalami penurunan.
3. Produsen ponsel pintar meningkatkan produksi dan pengiriman lebih awal sebagai langkah antisipasi terhadap penerapan tarif.
4. Sektor otomotif menghadapi ketidakpastian yang meningkat.
5. Di tingkat global, biaya pengiriman melonjak dan rute pelayaran mengalami perubahan.

Perang dagang ini tidak hanya mengubah lanskap perdagangan, tetapi juga memaksa industri untuk menyesuaikan strategi mereka di tengah ketidakpastian yang semakin tinggi. Meskipun asumsi APBN menargetkan inflasi rendah, skenario 17% mungkin memperhitungkan memburuknya perang dagang antara negara-negara besar, seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, atau bahkan meluas ke negara lain. Yang akan memperparah imported inflation dan cost-push inflation.

Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok (2018-2019) pada Perdagangan Indonesia dan Implikasinya untuk Skenario 2025: Pengalaman perang dagang 2018-2019 memberikan gambaran empiris tentang dampak yang mungkin terjadi.

Penurunan Ekspor Indonesia (Keseluruhan): Data menunjukkan penurunan nilai ekspor Indonesia dari USD 180,01 miliar (2018) menjadi USD 167,50 miliar (2019).

Penurunan ini disebabkan oleh kontraksi komoditas migas dan nonmigas akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan permintaan dari AS & Tiongkok. Ini konsisten dengan teori bahwa perang dagang menciptakan distorsi perdagangan yang mengurangi volume perdagangan global, sehingga berdampak negatif pada kinerja ekspor negara yang terintegrasi dalam rantai pasok global seperti Indonesia (Krugman & Obstfeld, 2018).

Penurunan Impor Non-Migas Indonesia: Impor non-migas juga menurun dari USD 158,82 miliar (2018) menjadi USD 148,84 miliar (2019), menunjukkan perlambatan ekonomi domestik dan aktivitas industri menekan permintaan impor bahan baku dan barang modal.

Kinerja Neraca Perdagangan: Ada risiko memperbesar defisit, meskipun kadang tercatat surplus (seringkali karena impor anjlok lebih dalam). Ekspor Indonesia ke AS dan Tiongkok melemah. Meskipun ada peluang trade diversion yang Anda sebutkan, laporan Nomura menunjukkan Indonesia tidak termasuk dalam daftar 30 negara yang diuntungkan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa efek trade diversion (pengalihan perdagangan) bagi Indonesia mungkin tidak cukup besar untuk mengkompensasi kerugian akibat perlambatan ekonomi global dan hambatan perdagangan.

Sektor Spesifik (Elektronik): Ketergantungan tinggi (lebih dari 70% bahan baku industri elektronik diimpor dari Tiongkok) membuat sektor manufaktur Indonesia rentan terhadap gangguan rantai pasok dan potensi kenaikan biaya jika terjadi eskalasi konflik atau hambatan pengiriman dari Tiongkok. Ini akan memicu inflasi biaya (cost-push inflation) pada produk-produk domestik yang sangat bergantung pada impor komponen tersebut.

Harga Komoditas Unggulan: Penurunan harga CPO dan batu bara pada periode 2018-2019 akibat perlambatan ekonomi global menekan nilai ekspor dan penerimaan negara. Eskalasi perang dagang di 2025 dapat menyebabkan volatilitas harga komoditas global, yang dapat berdampak ganda bagi Indonesia sebagai eksportir komoditas tertentu dan importir komoditas vital lainnya.

Volatilitas Pasar Keuangan: Pelemahan IHSG (misalnya, ke 6.194,50) menunjukkan bahwa ketidakpastian perang dagang menciptakan volatilitas pasar keuangan, menekan indeks saham, dan memicu pelemahan nilai tukar Rupiah. Ini sejalan dengan teori flight to quality, di mana investor menarik modal dari pasar berisiko (negara berkembang) ke aset yang lebih aman (seperti Dolar AS) di tengah ketidakpastian global.

1. Kenaikan Tarif Impor AS (atau Negara Maju Lainnya)

Kebijakan proteksionis yang agresif melalui kenaikan tarif impor oleh AS atau negara maju lainnya akan memberikan tekanan inflasi signifikan di Indonesia melalui beberapa kanal: a) Kanal Biaya Perdagangan Global (Cost-Push Inflation): Kebijakan tarif ini tidak hanya memengaruhi negara target, tetapi juga dapat menciptakan efek domino yang menaikkan biaya perdagangan global secara keseluruhan. Indonesia, sebagai bagian dari rantai pasok global, akan merasakan dampaknya melalui harga barang impor yang lebih tinggi. b) Dampak pada Ekspor Indonesia: Meskipun tidak secara langsung menaikkan inflasi, tarif impor yang tinggi di negara tujuan ekspor Indonesia bisa mengurangi pendapatan ekspor dan devisa. Ini pada gilirannya dapat melemahkan rupiah dan memicu inflasi impor. c) Pergeseran Investasi dan Produksi: Kebijakan proteksionis dapat menyebabkan pergeseran investasi dan produksi global, menciptakan ketidakpastian dan potensi gangguan pasokan yang dapat menekan harga. (Zakia, n.d.)

Eskalasi perang dagang, terutama antara AS dan Tiongkok, dengan kebijakan tarif yang agresif seperti yang digambarkan dalam skenario, dapat memperburuk tekanan inflasi di Indonesia melalui beberapa kanal:

a. Kanal Biaya Impor (Cost-Push Inflation)

Indonesia memiliki ketergantungan signifikan pada impor bahan baku, komponen, dan barang modal, terutama dari Tiongkok. Misalnya, lebih dari 70% bahan baku industri elektronik Indonesia masih diimpor dari Tiongkok. Ketika AS menaikkan tarif pada produk Tiongkok, atau Tiongkok membalas dengan tarif pada produk AS, ini akan mengganggu rantai pasok global. Biaya produksi di Tiongkok atau AS bisa meningkat, dan ini akan diteruskan ke harga ekspor mereka. Akibatnya, barang-barang yang diimpor Indonesia (baik langsung dari AS/Tiongkok maupun tidak langsung dari negara ketiga yang terkena dampak perang dagang) akan menjadi lebih mahal. Ini langsung memicu inflasi cost-push di Indonesia.

b. Kanal Nilai Tukar Rupiah

Penurunan Ekspor dan Devisa: Kebijakan tarif AS yang tinggi pada produk-produk yang juga diekspor Indonesia (misalnya tekstil, alas kaki, elektronik) dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS. Penurunan ekspor berarti pendapatan devisa Indonesia berkurang. Kurangnya pasokan dolar AS di dalam negeri dapat menekan nilai tukar rupiah dan menyebabkan depresiasi (P3BMS, 2025).

Arus Modal Keluar (Capital Outflow): Ketidakpastian global akibat perang dagang yang intensif seringkali mendorong investor untuk menarik modalnya dari pasar negara berkembang (termasuk Indonesia) menuju aset yang dianggap lebih aman (seperti Dolar AS). Penarikan modal ini akan melemahkan rupiah secara signifikan. Inflasi Impor dari Depresiasi Rupiah: Depresiasi rupiah yang disebabkan oleh tekanan eksternal ini akan memperparah imported inflation, seperti dijelaskan sebelumnya. Barang-barang yang diimpor akan menjadi lebih mahal dalam rupiah, meneruskan tekanan harga ke konsumen.

c. Kanal Sentimen dan Ekspektasi

Ketidakpastian yang diciptakan oleh perang dagang dan kebijakan tarif yang agresif dapat memicu sentimen negatif di pasar domestik dan meningkatkan ekspektasi inflasi di masyarakat. Jika masyarakat percaya harga akan terus naik, mereka mungkin akan mempercepat pembelian, yang dapat mendorong inflasi lebih lanjut.

Krisis Moneter Asia 1997-1998 adalah episode kelam dalam sejarah ekonomi Indonesia, ditandai oleh lonjakan inflasi yang ekstrem hingga mencapai 77,6% pada tahun 1998. Inflasi ini bukan semata-mata fenomena moneter, melainkan konsekuensi dari kombinasi kelemahan fundamental ekonomi yang menumpuk, termasuk rapuhnya sektor perbankan, akumulasi utang luar negeri swasta yang besar tanpa lindung nilai yang memadai, serta ketidakstabilan politik yang mengurangi kepercayaan investor. Faktor-faktor ini secara kolektif memicu kepanikan pasar dan depresiasi nilai tukar Rupiah yang sangat drastis, menjadi pemicu utama rantai transmisi inflasi. (Sunardi et al., 2024)

Mekanisme penularan inflasi pada periode tersebut bersifat multifaset. Depresiasi Rupiah yang ekstrem memicu *imported inflation* secara langsung, karena harga barang-barang impor dan komponen produksi yang diimpor melonjak tajam dalam nilai Rupiah (mekanisme *cost-push*). Selain itu, hilangnya kepercayaan pasar dan kepanikan publik menyebabkan masyarakat cenderung membelanjakan uang secepat mungkin, menciptakan tekanan permintaan dan memicu spiral upah-harga. Ekspektasi inflasi yang tidak terkendali memainkan peran krusial, di mana pelaku ekonomi (produsen dan konsumen) mengantisipasi kenaikan harga yang lebih tinggi di masa depan, yang kemudian menjadi ramalan yang terpenuhi. Sifat inflasi pada 1998 utamanya adalah *cost-push* yang parah akibat depresiasi, namun diperparah oleh elemen *demand-pull* dari kepanikan belanja dan efek ekspektasi.

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Inflasi: Krisis 1998 vs. Skenario Perang Dagang 2025

Indikator Perbandingan	Krisis Moneter 1998	Skenario Perang Dagang/Tarif 2025
Pemicu Utama	Kelemahan Internal: Krisis nilai tukar dan kepercayaan domestik parah (utang swasta, sektor perbankan rapuh, tata kelola buruk).	Guncangan Eksternal: Gangguan rantai pasok global, kenaikan biaya perdagangan internasional (tarif, logistik), potensi pelemahan Rupiah akibat <i>capital outflow</i> dan dampak neraca pembayaran.
Kanal Transmisi Dominan	Depresiasi Rupiah Ekstrem: Pelemahan Rupiah masif (Rp2.500 ke Rp17.000) memicu lonjakan harga impor (<i>cost-push</i>), diperparah kepanikan pasar (<i>demand-pull</i>), dan <i>capital flight</i> .	Kenaikan Biaya Impor & Disrupsi Rantai Pasok: Inflasi <i>cost-push</i> melalui kenaikan harga barang impor karena tarif, disrupsi rantai pasok. Depresiasi Rupiah masih berkontribusi, namun kemungkinan tidak seekstrem 1998 jika fundamental domestik terjaga.
Sifat Inflasi	Kombinasi <i>cost-push</i> ekstrem (depresiasi nilai tukar) dan <i>demand-pull</i> (kepanikan belanja dan ekspektasi). Sistem keuangan yang rapuh memperparah dampaknya.	Cenderung didominasi oleh <i>imported inflation</i> dan tekanan <i>cost-push</i> dari disrupsi perdagangan global. Jika ada kelemahan fundamental domestik parah, <i>demand-pull</i> bisa menguat.
Asal Guncangan	Akar masalah internal (utang swasta, sektor keuangan rapuh) diperparah sentimen regional.	Kebijakan unilateral negara adidaya (AS) mengganggu sistem perdagangan global.

Indikator Perbandingan	Krisis Moneter 1998	Skenario Perang Dagang/Tarif 2025
Skala Depresiasi Rupiah	Katastrofik (sekitar 580% depresiasi).	Berpotensi menekan Rupiah (studi Kemhan memprediksi hingga 10-11%), namun skala dan kecepatan kejatuhan mungkin tidak seekstrem 1998 tanpa masalah kepercayaan sistemik domestik.
Faktor Pendorong Lain	Utang swasta valas, kepanikan bank, <i>crowd-out effect</i> investasi.	Volatilitas harga komoditas global, restrukturisasi rantai pasok global.

Meskipun keduanya berpotensi memicu inflasi tinggi, sumber dan mekanisme dominan berbeda. Krisis 1998 didominasi oleh kelemahan internal dan krisis kepercayaan yang menyebabkan depresiasi mata uang yang bersifat katastrofik, memicu inflasi cost-push sekaligus demand-pull akibat kepanikan. Sebaliknya, skenario 2025 lebih didorong oleh guncangan pasokan eksternal (external supply shocks) dari perang dagang dan tarif, yang meningkatkan biaya impor dan mengganggu rantai pasok global. Meskipun depresiasi Rupiah tetap menjadi kanal penting, skala kejatuhannya mungkin tidak seekstrem 1998 jika fundamental ekonomi domestik dan kepercayaan pasar lebih terjaga. Namun, jika perang dagang memicu masalah di sektor keuangan atau kepercayaan domestik, mekanisme 1998 bisa berulang. (*Laporan Kebijakan Moneter Triwulan*, 2025)

Meskipun konteksnya bervariasi, pengalaman negara-negara lain yang berhasil mengatasi inflasi tinggi menawarkan pelajaran berharga:

Banyak kasus hiperinflasi, seperti di Weimar Jerman (1920-an) atau Zimbabwe (2007-2009), sering kali diawali dengan pencetakan uang besar-besaran untuk membiayai defisit fiskal yang tidak terkendali (Investopedia, Number Analytics). Pelajaran pentingnya adalah menjaga disiplin fiskal dengan mengelola defisit anggaran secara hati-hati, meningkatkan penerimaan negara (perluasan basis pajak, optimalisasi PNB), dan efisiensi belanja. Ini sesuai dengan strategi reformasi fiskal dalam APBN 2026.

Bank sentral yang independen dan memiliki kredibilitas kuat akan lebih efektif dalam mengelola ekspektasi inflasi dan menerapkan kebijakan yang tidak populer namun diperlukan (misalnya, menaikkan suku bunga). IMF menekankan bahwa negara dengan sejarah inflasi tinggi mungkin perlu respons moneter yang lebih agresif (IMF, 2025). (Jácome et al., 2025, p. 38) Kebijakan forward-looking Bank Indonesia dan fokus pada stabilitas harga melalui target inflasi adalah kunci. Beberapa negara yang mengalami hiperinflasi ekstrem, seperti Jerman dengan Rentenmark atau Zimbabwe dengan adopsi Dolar AS, menunjukkan bahwa reformasi mata uang yang tegas dan didukung oleh jaminan fiskal serta kemandirian moneter dapat menghentikan spiral inflasi secara cepat (Number Analytics). Meskipun Indonesia tidak berada pada skenario hiperinflasi, pelajaran ini menekankan perlunya tindakan cepat dan tegas jika inflasi benar-benar melonjak.

Kredibilitas bank sentral dalam mengelola ekspektasi inflasi sangat penting. Jika masyarakat dan pelaku usaha percaya bahwa bank sentral serius dalam menekan inflasi, mereka cenderung tidak akan melakukan panic buying atau menuntut kenaikan upah yang berlebihan, sehingga membantu meredam inflasi. Pengalaman Indonesia sendiri (Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah - TPIP/TPID) dan negara lain menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya tugas bank sentral, tetapi juga memerlukan koordinasi kuat antara pemerintah

pusat dan daerah dalam mengelola pasokan pangan, subsidi, dan distribusi barang. (*Daftar Negara Yang Pernah Mengalami Hiperinflasi Dan Stagflasi*, 2022).

Tabel 3. Pengalaman Negara Lain dalam Mengatasi Inflasi Tinggi: Pelajaran bagi Indonesia

Negara (Periode)	Penyebab Inflasi Tinggi/Hiperinflasi	Kebijakan yang Diterapkan & Hasil	Pelajaran Spesifik bagi Indonesia
Republik Weimar, Jerman (1920-an)	Pencetakan uang masif untuk membiayai reparasi perang dan defisit fiskal, menyebabkan hilangnya kepercayaan total pada mata uang.	Gagal (Awal): Terus mencetak uang hanya memperparah inflasi Berhasil (Akhir): Mengintroduksi Rentenmark (Reformasi Mata Uang) didukung oleh komitmen kredibel pemerintah untuk menghentikan pencetakan uang dan jaminan aset riil. Ini berhasil mengembalikan kepercayaan.	1. Disiplin Fiskal Ketat: Hindari pembiayaan defisit dengan pencetakan uang 2. Kredibilitas Bank Sentral Krusial: Pentingnya independensi dan kredibilitas Bank Indonesia dalam menjaga nilai mata uang dan mengelola ekspektasi 3. Kepercayaan Pasar: Kepercayaan publik pada komitmen pemerintah dan BI adalah fondasi stabilitas.
Zimbabwe (2007-2009)	Pencetakan uang tidak terkendali untuk membiayai defisit kronis, ditambah kebijakan ekonomi yang merusak (mis. reformasi agraria) dan hilangnya kepercayaan total.	Gagal (Awal): Upaya "menghilangkan nol" dari mata uang berulang kali gagal karena masalah fundamental tidak diatasi Berhasil (Akhir): Dollarization (adopsi Dolar AS) secara <i>de facto</i> , yang menghentikan kemampuan pemerintah untuk mencetak uang dan mengembalikan stabilitas harga.	1. Jangan Sampai Kehilangan Kepercayaan Total: Dampak kehilangan kepercayaan bisa menyebabkan mata uang domestik tak berharga 2. Dollarization Bukan Solusi Ideal: Mengadopsi mata uang asing berarti menyerahkan kedaulatan moneter, merupakan pilihan terakhir 3. Reformasi Struktural Wajib: Masalah fundamental ekonomi harus diatasi untuk menjamin pasokan dan pendapatan devisa.

Berdasarkan analisis dari berbagai artikel dan skenario yang dibahas, termasuk asumsi makro APBN 2025/2026, potensi eskalasi perang dagang, dan pelajaran dari krisis 1998, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang tepat bagi Indonesia untuk menghadapi potensi lonjakan inflasi, terutama skenario ekstrem 17% di tahun 2025.

Bank Indonesia (BI) dan pemerintah harus menjadikan stabilitas harga dan nilai tukar sebagai prioritas utama. Meskipun APBN 2025 menargetkan inflasi rendah 2,5% dan pertumbuhan 5,2%, dalam skenario inflasi melonjak hingga 17%, prioritas harus bergeser ke pengendalian inflasi agresif, bahkan jika itu berarti mengorbankan sebagian target pertumbuhan jangka pendek. Perlu ada mekanisme koordinasi yang sangat erat dan responsif antara BI dan Kementerian Keuangan. Kebijakan fiskal yang ekspansif (seperti program Makan Bergizi Gratis atau peningkatan belanja) harus dievaluasi secara cermat dampaknya terhadap inflasi dan nilai tukar, dan disesuaikan jika memicu tekanan harga. (Santoso, 2025)

Disiplin Fiskal Terukur: Meskipun APBN 2026 merencanakan defisit terukur (2,48%–2,53% PDB), dalam skenario inflasi tinggi, pemerintah harus siap untuk meninjau kembali dan mengetatkan kebijakan fiskal jika tekanan inflasi berasal dari sisi permintaan atau defisit yang memicu pelemahan rupiah. (Nugraha, 2025)

Jika inflasi melonjak tajam (seperti skenario 17%), BI tidak boleh ragu untuk menaikkan BI-Rate secara signifikan dan front-loaded, bahkan melebihi level yang dipertahankan saat ini (5,75%). Kenaikan suku bunga diperlukan untuk meredam permintaan, mengelola ekspektasi inflasi, dan menjaga daya tarik aset domestik bagi investor asing. Memperkuat intervensi valuta asing (NDF, spot, DNDF) dan pembelian SBN di pasar sekunder adalah krusial. Ini harus dilakukan secara konsisten dan transparan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah imported inflation yang parah akibat depresiasi nilai tukar. Kebijakan ini harus terus diperkuat untuk menarik aliran modal asing (menjaga struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas tetap menarik) dan memastikan kecukupan likuiditas perbankan untuk mendukung perekonomian riil, tanpa memicu gelembung.

Mengingat kerentanan Indonesia terhadap fluktuasi harga komoditas global dan gangguan rantai pasok (seperti anjloknya ekspor LNG AS ke Tiongkok), program ketahanan pangan (produktivitas petani/nelayan, lumbung pangan) dan energi (peningkatan lifting migas, EBT) dalam APBN 2026 harus dipercepat. Ini akan mengurangi ketergantungan impor dan menstabilkan harga domestik. Pemerintah perlu memastikan stok komoditas pangan dan energi strategis mencukupi dan sistem distribusinya efisien untuk mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan atau disrupsi pasokan di dalam negeri. Penyempurnaan subsidi agar lebih tepat sasaran akan mengurangi beban APBN dan mencegah distorsi pasar, sekaligus melindungi kelompok rentan.

Indonesia perlu secara aktif mencari mitra dagang dan pemasok alternatif untuk mengurangi risiko ketergantungan pada negara-negara yang terlibat langsung dalam perang dagang. Hal ini juga termasuk mencari bahan baku dan komponen dari berbagai negara. Dalam menghadapi trade diversion, Indonesia harus meningkatkan daya saing produk ekspornya melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM (IMM hingga 0,57), dan perbaikan iklim investasi. Kebijakan ini akan membantu Indonesia memanfaatkan peluang dari pergeseran perdagangan dan menjaga devisa. Pemerintah harus proaktif dalam diplomasi perdagangan untuk mengamankan akses pasar dan meminimalkan dampak negatif kebijakan proteksionis negara lain terhadap Indonesia.

Dalam skenario inflasi tinggi, program-program seperti Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, dan program kesehatan gratis (perluasan JKN, pemeriksaan kesehatan gratis) harus diimplementasikan secara efisien dan cepat untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Ini krusial untuk mencegah

lonjakan kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial. Memberdayakan UMKM tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal tetapi juga dapat menjadi penyangga daya tahan ekonomi di tengah gejolak.

Bank Indonesia dan pemerintah harus secara proaktif dan transparan mengkomunikasikan situasi ekonomi, tantangan inflasi, dan langkah-langkah kebijakan yang diambil. Komunikasi yang kredibel akan membantu mengelola ekspektasi inflasi masyarakat dan mencegah kepanikan yang tidak perlu.³ Langkah Mitigasi Ketika Inflasi Mencapai 17% di Tahun 2025

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam skenario hipotetis lonjakan inflasi hingga 17% di Indonesia pada awal pemerintahan Prabowo Subianto tahun 2025, sebuah proyeksi yang signifikan dibandingkan target inflasi resmi APBN 2025 sebesar 2,5%. Analisis ini mengidentifikasi dan membedah kombinasi faktor domestik dan eksternal yang berpotensi mendorong skenario ekstrem tersebut.

Dari sisi domestik, hasil analisis menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar Rupiah yang signifikan merupakan kanal transmisi inflasi yang krusial, sesuai dengan teori *imported inflation* dan *pass-through effect*. Pelemahan Rupiah akan secara langsung meningkatkan biaya barang impor dan bahan baku, memicu inflasi biaya produksi (*cost-push inflation*) yang merugikan daya beli masyarakat dan aktivitas industri. Selain itu, potensi kebijakan fiskal yang ekspansif, terutama melalui program belanja besar yang tidak diimbangi peningkatan kapasitas produksi, dapat menciptakan tekanan *demand-pull inflation*. Meskipun APBN 2025 menargetkan defisit terukur, risiko inflasi tetap ada jika pembiayaan atau implementasi program tidak dikelola secara prudent.

Sementara itu, dari sisi eksternal, eskalasi perang dagang global yang agresif, ditandai dengan kenaikan tarif impor AS dan balasan dari mitra dagang, diperkirakan akan menjadi pendorong inflasi yang kuat. Mekanisme ini terutama bekerja melalui gangguan rantai pasok global, peningkatan biaya logistik, dan volatilitas harga komoditas global, yang semuanya akan menekan inflasi dari sisi biaya di Indonesia. Dampak perang dagang 2018-2019 terhadap penurunan ekspor dan volatilitas pasar keuangan Indonesia menjadi indikator historis akan kerentanan ini.

Perbandingan dengan Krisis Moneter 1998 menegaskan bahwa meskipun mekanisme penularan inflasi berbeda—Krisis 1998 didominasi oleh kerapuhan fundamental internal dan krisis kepercayaan yang memicu depresiasi katastrofik, sedangkan skenario 2025 lebih fokus pada guncangan pasokan eksternal—dampak lonjakan inflasi 17% diperkirakan akan sama merusaknya. Inflasi tinggi akan secara serius menghambat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), mengikis daya beli dan konsumsi rumah tangga, menekan investasi, serta berpotensi memperburuk neraca perdagangan. Pada tingkat sosial, hal ini akan meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta memicu ketidakstabilan sosial dan politik.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menyajikan analisis skenario inflasi ekstrem yang komprehensif, mengintegrasikan berbagai teori ekonomi (seperti *imported inflation*, *cost-push*, *demand-pull*, dan teori *pass-through effect*) dengan data historis dan proyeksi. Hasil analisis menggarisbawahi urgensi bagi pemerintahan baru untuk memiliki strategi mitigasi inflasi yang proaktif dan terkoordinasi. Rekomendasi kebijakan yang muncul dari analisis ini mencakup pengetatan moneter yang responsif, konsolidasi fiskal yang hati-hati, intervensi valuta asing yang efektif, implementasi kebijakan sisi penawaran untuk

meningkatkan produktivitas dan pasokan, serta strategi komunikasi publik yang transparan untuk mengelola ekspektasi inflasi.

Saran

Berdasarkan pembelajaran dari pengalaman pahit Krisis 1998 dan studi kasus negara lain dalam mengatasi inflasi tinggi, serta mempertimbangkan dinamika ekonomi global saat ini, Indonesia perlu merumuskan rekomendasi kebijakan yang kuat dan terkoordinasi.

Pertama, sinergi kebijakan moneter dan fiskal harus menjadi prioritas utama; Bank Indonesia perlu siap untuk mengambil langkah pengetatan moneter yang tegas dan intervensi nilai tukar yang kuat jika Rupiah tertekan, sementara pemerintah harus menjaga disiplin fiskal dan memastikan belanja ekspansif tetap produktif dan tidak memicu inflasi.

Kedua, penguatan ketahanan pangan dan energi melalui diversifikasi sumber pasokan dan peningkatan produksi domestik sangat krusial untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga komoditas global.

Ketiga, dalam menghadapi trade diversion akibat perang dagang, Indonesia harus proaktif dalam diversifikasi mitra dagang dan rantai pasok, serta meningkatkan daya saing ekspor untuk memanfaatkan peluang dan menjaga devisa.

Keempat, jaring pengaman sosial yang responsif dan terarah harus diperkuat untuk melindungi daya beli masyarakat rentan dari dampak lonjakan harga.

Terakhir, komunikasi publik yang kredibel dan transparan dari pemerintah dan Bank Indonesia sangat penting untuk mengelola ekspektasi inflasi dan menjaga kepercayaan pasar serta masyarakat, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari skenario inflasi tinggi yang tidak diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, M. A., & Rofiuddin, M. (2023). The US-China Trade War in Macroeconomic Studies of the Indonesian Sharia Stock Index. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 8(3), 218–233. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v8i3.538>
- Ariesta, A. (2025). *Sri Mulyani Ungkap Tren Trade Diversion akibat Tarif Impor Trump, Indonesia Berpeluang Ambil Alih Pasar*. Okezone.Com.
- Boediono. (2020). *Ekonomi Moneter*. BPFE Yogyakarta.
- Daftar Negara yang Pernah Mengalami Hiperinflasi dan Stagflasi*. (2022). Cnnindonesia.Com.
- Hanifah, D. H. S., Muharam, H., & Erik Kartiko. (2020). *Ekonomi Pembangunan* (H. Muharam (Ed.)). Universitas Garut.
- Idris, M. (2024). *Dampak Krisis Moneter 1998: Sisi Ekonomi, Sosial, hingga Politik*. Kompas.Com.
- Jácome, L. I., Magud, N. E., Pienknagura, S., & Uribe, M. (2025). *Inflation Targeting and the Legacy of High Inflation*.
- Laporan Kebijakan Moneter Triwulan*. (2025). Bi.Go.Id.
- Menkeu Sampaikan KEM-PPKF 2026 Hari Ini*. (2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nugraha, D. W. (2025). *Ujian Kebijakan Fiskal Ekspansif 2026 di Tengah Badai Global*. Kompas.Id.
- Pada Desember 2024 inflasi Year-on-Year (y-on-y) adalah sebesar 1,57 persen*. (2025). Badan Pusat Statistik (BPS).

- Purwowidhu, C. (2025). *Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Perang Tarif*. Media Keuangan Kementerian Keuangan.
- Ramadan, R. (2025). *Inflasi dan Nilai tukar mata uang: Hubungan yang saling berkaitan*.
- Rohmah, M., Basyir, T., Abror, D., Masitoh, F. N., & Azmiyati, A. (2024). DAMPAK GLOBALISASI, KEMISKINAN, DAN KEBIJAKAN MAKROEKONOMI TERHADAP STABILITAS EKONOMI INDONESIA. 9(1), 1–24.
- Santoso, E. (2025). *Bank Indonesia dan Pemerintah Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Inflasi 2025*. Media Asuransi.
- Segara, B., & Prakoso, R. I. (2025). *Informasi APBN 2025*.
- Sriyana, J. (2022). Fiscal and monetary policies to reduce inflation rate in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 82–91. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art8>
- Sunardi, A., Nur Afiah, W., Nuranisya Fadlah, S., & Ribawati, E. (2024). KRISIS MONETER 1997-1998: AKAR PENYEBAB, DAMPAK EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PENANGANAN DI INDONESIA. *Sindoro Cendekia Pendidikan*, 5(6).
- Supriyanto, B. E. (2025). *Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2025: Mampukah APBN Menjawab Tantangan?* Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
- Yulianti, S. (2025). *Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Harga Impor dan Inflasi di Indonesia*. Kompasiana.
- Zakia, A. (n.d.). *Dampak Kebijakan Proteksionis Amerika Serikat terhadap Ekonomi Indonesia*. Kompasiana.